



KATALOG : 9204.71

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PDRB

PROPINSI SULAWESI UTARA



TAHUN 2000-2005



Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI SULAWESI UTARA
MENURUT PENGGUNAAN
2000 - 2005**

Nomor Katalog : 9204.71

ISBN : 979 488 507 x

Nomor Publikasi : 71550.0602

Naskah : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Cover Design : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2006

Dicetak Oleh :

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Sulawesi Utara menurut Penggunaan tahun 2000 - 2005 merupakan lanjutan dari publikasi sebelumnya. yang menggunakan tahun dasar 2000.

Dalam publikasi ini, selain berisi tabel – tabel penting juga dilengkapi dengan beberapa penjelasan, antara lain : konsep, definisi dan uraian ringkas mengenai PDRB menurut penggunaan.

Tujuan publikasi ini adalah untuk membantu pengguna publikasi ini agar lebih jelas dalam memahami perkembangan kinerja PDRB Propinsi Sulawesi Utara pada tahun 2000-2005 secara garis besar.

Melalui publikasi ini pula, dapat diperoleh gambaran tentang kecenderungan kinerja PDRB menurut penggunaan selama periode tahun 2000-2005, baik yang dihitung atas dasar harga Berlaku, maupun atas dasar harga Konstan 2000.

Oleh karena keterbatasan data yang tersedia, maka sudah tentu penerbitan ini masih ditemukan kekurangan dan kelemahan yang perlu disempurnakan pada penerbitan mendatang sehingga saran dan kritik yang konstruktif tetap diharapkan.

Akhirnya kepada semua pihak, terutama sumber data yang telah membantu hingga dapat diterbitkannya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Manado, September 2006
Kepala Badan Pusat Statistik
Propinsi Sulawesi Utara

Drs. Jasa Bangun, MSi
NIP. 340005025

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
II. RUANG LINGKUP DAN DEFINISI.....	5
2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga.....	5
2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Yang Tidak Mencari Untung (Nirlaba)	6
2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	7
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	9
2.5. Perubahan Stok.....	11
2.6. Ekspor dan Impor.....	11
III. METODE PENGHITUNGAN DAN SUMBER DATA.....	13
3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga.....	13
3.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Yang Tidak Mencari Untung (Nirlaba).....	14
3.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	14
3.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	15
3.5. Perubahan Stok.....	15
3.6. Ekspor dan impor.....	16
IV. TINJAUAN PDRB PROPINSI SULAWESI UTARA DARI PENDEKATAN PENGGUNAAN.....	17
4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	17
4.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Yang Tidak mencari Untung (Nirlaba).....	21
4.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	22
4.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	23
4.5. Ekspor dan impor.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi Penggunaan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2000-2005 (persen).....	17
Tabel 2.	Struktur Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga ADHB dan ADHK Tahun 2000-2005 (persen).....	17
Tabel 3.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2000-2005.....	18
Tabel 4.	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Tahun 2000-2005..	20
Tabel 5.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Tahun 2000-2005.....	22
Tabel 6.	Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2000-2005.....	23
Tabel 7.	Ekspor dan Impor Barang dan Jasa Tahun 2000-2005.....	25

H a m a n

DAFTAR GAMBAR

H a m a n

Gambar 1.	Distribusi komponen PDRB menurut penggunaan tahun 2005 (persen)	15
Gambar 2.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 – 2005.....	16
Gambar 3.	Grafik Persentase Konsumsi Rumah Tangga ADHB Tahun 2000 –2005.....	18
Gambar 4.	Grafik Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2000-2005.....	19
Gambar 5.	Grafik Laju Pertumbuhan Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Tahun 2000 – 2005	21
Gambar 6.	Grafik Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Tahun 2000 –2005 (milyar rupiah).....	22
Gambar 7.	Nilai Ekspor, Net Ekspor, dan Impor Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2000 – 2005 (milyar rupiah).....	24
Gambar 8.	Persentase Perbandingan Ekspor Luar Negeri dan Luar Propinsi Terhadap Nilai Total Ekspor Tahun 2000-2005 (milyar rupiah).....	26
Gambar 9.	Pertumbuhan dan Kontribusi Ekspor dan Impor Tahun 2000-2005 (persen).....	27
Gambar 10.	Grafik Perkembangan Kurs Nilai Tengah \$US Tahun 2000-2005 (Rupiah).....	27

Gambar 11. Persentase Impor Luar Negeri dan Luar Propinsi Terhadap Nilai Total Impor Tahun 2000-2005 (milyar rupiah)..... 28

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>H a m a n</i>
Tabel 1. PDRB Propinsi Sulawesi Utara Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 – 2005 (Jutaan Rupiah).....	28
Tabel 2. PDRB Propinsi Sulawesi Utara Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 – 2005 (Jutaan Rupiah)	29
Tabel 3. Distribusi Persentase PDRB Propinsi Sulawesi Utara Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2005 (persen)	30
Tabel 4. Distribusi Persentase PDRB Propinsi Sulawesi Utara Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2000-2005 (persen).....	31
Tabel 5. Indeks Perkembangan PDRB Propinsi Sulawesi Utara Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku (2000 = 100).....	32
Tabel 6. Indeks Perkembangan PDRB Propinsi Sulawesi Utara Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 (2000 = 100).....	33
Tabel 7. Indeks Berantai PDRB Propinsi Sulawesi Utara Menurut Penggunaan Atas dasar Harga Berlaku (Tahun Sebelumnya=100).....	34
Tabel 8. Indeks Berantai PDRB Propinsi Sulawesi Utara Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Tahun Sebelumnya = 100).....	35
Tabel 9. Indeks Implisit PDRB Propinsi Sulawesi Utara Menurut Penggunaan.....	36

<http://sulut.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi (makro) yang semakin penting keberadaannya, baik ditingkat nasional maupun regional. Dimana penghitungannya dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan produksi (*production approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*) dan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*).

Tersedianya data PDRB secara rinci dan berkesinambungan akan membantu perencana dalam mengevaluasi hasil pembangunan serta merencanakan pembangunan dimasa yang akan datang khususnya dibidang ekonomi .

1.1 PDRB Menurut Penggunaan

PDRB yang dihitung melalui pendekatan produksi menjelaskan bagaimana PDRB dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah. Penghitungan PDRB yang demikian disebut sebagai PDRB menurut sektor atau biasa disebut sebagai PDRB dari sisi penyediaan (*supply side*). PDRB yang dihitung melalui pendekatan pengeluaran menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi permintaan domestik di suatu wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan penduduk di luar wilayah tersebut. PDRB yang demikian disebut PDRB menurut penggunaan atau menurut pengeluaran (*Gross Regional Domestic Product by Expenditure*), atau bisa juga disebut sebagai PDRB dari sisi permintaan (*demand side*).

Pada garis besarnya permintaan akan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi, bila dilihat dari segi penggunaannya, digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi, yang disebut dengan konsumsi antara (*intermediate consumption*).

b. Barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi antara, akan habis dalam proses produksi, sedangkan barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi akhir meliputi :

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba)
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah
4. Pembentukan modal tetap bruto
5. Perubahan stok
6. Ekspor dan impor

Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir, tidak saja berasal dari produksi domestik, tetapi juga berasal dari impor baik dari luar negeri maupun dari wilayah lain. Secara ringkas keadaan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Y + M = C + IF + IS + E$$

Dimana : Y = Produk Domestik

M = Impor

C = Konsumsi RT, Pemerintah dan Lembaga Swasta nirlaba

IF = Pembentukan modal tetap bruto

IS = Perubahan stok

E = Ekspor

Oleh karena tujuannya adalah menghitung produk domestik (pendapatan yang ditimbulkan di daerah tersebut), maka persamaan tersebut diatas dapat diturunkan menjadi :

$$Y = C + IF + IS + E - M$$

Untuk itu, dalam penyajian PDRB menurut penggunaan harus dihitung komponen-komponen permintaan akhir.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN DEFINISI

2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran Konsumsi rumah tangga meliputi semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa (baik barang tahan lama maupun barang tak tahan lama) dikurangi hasil penjualan netto (penjualan dikurangi pembelian) barang-barang bekas/tak terpakai yang dilakukan oleh suatu rumah tangga untuk periode tertentu (biasanya satu tahun). Yang dimaksud dengan pengeluaran adalah selain pengeluaran untuk bahan makanan, minuman, pakaian, bahan bakar dan jasa-jasa, termasuk juga pengeluaran untuk barang yang tidak ada duanya (tidak di produksi kembali) seperti karya seni, barang antik dan lain-lain. Barang tahan lama seperti mobil, motor, furniture, radio, kulkas, televisi, dan lain-lain juga termasuk salah satu jenis pengeluaran.

Pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya juga termasuk didalam konsumsi rumah tangga. **Pembelian rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi**, tetapi pengeluaran atas rumah yang di tempati seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening listrik, air, telepon, dan lain-lain, merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Dalam hal barang yang mempunyai kegunaan ganda, maka pembelian dan biaya operasional barang tersebut harus dialokir secara proporsional terhadap masing-masing kegiatan yang dilakukan. Misalnya mobil, selain di gunakan untuk keperluan rumah tangga juga dipakai sebagai penunjang dalam kegiatan usaha rumah tangga ybs misalnya, dipakai sebagai alat angkut para pegawai dari perusahaan yang dimiliki oleh anggota rumah tangga. Sama halnya dengan pengeluaran terhadap sewa, bahan bakar, listrik, air, dan jasa lainnya yang dipakai untuk bermacam-macam aktivitas oleh anggota rumah tangga, juga harus diperkirakan pengeluarannya untuk masing-masing kegiatan tersebut terhadap sumbangan yang diberikan.

Pengeluaran pegawai yang merupakan biaya antara bagi perusahaan, walaupun akan mengurangi gaji pegawai tersebut, tidak dianggap sebagai konsumsi rumah tangga.

Misalnya pembelian alat-alat kerja seperti lampu senter, bahan peledak dan lain-lain oleh buruh tambang untuk melakukan pekerjaannya.

Ada dua jenis konsep yang dipakai dalam penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga :

1. Pengeluaran konsumsi rumahtangga yang terbatas pada wilayah domestik atau region.
2. Pengeluaran konsumsi rumahtangga yang terbatas pada rumah tangga penduduk suatu region.

Pengertian konsep pertama adalah pengeluaran oleh anggota rumah tangga disuatu region, tidak terkecuali oleh penduduk atau bukan penduduk region tersebut. Jadi dalam hal ini semua pengeluaran oleh anggota rumah tangga staf kedutaan asing, staf perwakilan daerah, anggota militer dan lain-lain yang berada di suatu wilayah, serta pengeluaran turis asing; adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam wilayah domestik region tersebut.

Pengertian konsep yang kedua adalah pengeluaran konsumsi rumahtangga di wilayah domestik ditambah dengan pembelian langsung oleh rumah tangga penduduk di luar region, dikurangi dengan pengeluaran rumahtangga bukan penduduk yang dilakukan di wilayah domestik.

Pengeluaran rumahtangga yang sedang mengadakan perjalanan dinas, yang pengeluarannya dibiayai oleh perusahaan atau kantor, tidak termasuk dalam konsumsi rumah tangga, karena merupakan biaya antara dari perusahaan atau kantor yang bersangkutan. Konsep pengeluaran rumahtangga yang dipakai dalam komponen Produk Domestik Regional Bruto adalah pengeluaran konsumsi rumahtangga penduduk (konsep kedua).

2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit (Nirlaba)

Lembaga swasta yang tidak mencari untung adalah lembaga swasta yang dalam operasinya tidak bertujuan mencari keuntungan. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung meliputi semua pengeluaran untuk pembelian barang dan

jasa, pembayaran upah dan gaji, penerimaan transfer, penyusutan dan pajak tidak langsung neto, dikurangi dengan penjualan barang-barang bekas/tak terpakai.

Lembaga swasta yang tidak mencari untung terdiri dari lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, seperti: organisasi serikat buruh, persatuan para ahli/persatuan profesi, organisasi politik, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan formal maupun non formal, badan-badan kesehatan dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang tujuan dari kegiatan tersebut tidak mencari untung.

Lembaga swasta yang tidak mencari untung mungkin saja mempunyai badan hukum dan mungkin tidak. Lembaga/badan swasta yang tidak mencari untung yang masalah keuntungannya dan pengawasannya sepenuhnya atau sebagian besar ditangani oleh pemerintah dan merupakan bagian kegiatan dari pemerintah, tidak termasuk dalam lembaga swasta yang dimaksud ini.

2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah adalah sama dengan nilai jasa yang dihasilkan untuk keperluan konsumsi sendiri. Nilai dari jasa ini adalah sebesar nilai produksi bruto dikurangi dengan jumlah penjualan barang dan jasa yang tidak dapat di pisahkan dari kegiatan pemerintah. Kegiatan pemerintah meliputi kegiatan administrasi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah, termasuk juga administrasi pertahanan dan keamanan. Pemerintah daerah dalam hal ini meliputi tingkat propinsi, kabupaten/kota dan tingkat desa. Sedangkan pemerintah pusat mencakup semua: Badan/Lembaga Tinggi Negara, Departemen dan Unsur Departemen serta instansi lain beserta jajarannya di daerah sebagai dinas instansi vertikal. Dalam kegiatan ini tidak termasuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik negara seperti: Perum, Perjan, PT (Persero, PN) dan lainnya, karena kegiatan-kegiatan ini telah tercakup dalam sektor yang bersangkutan atau lapangan usaha masing-masing.

Kegiatan pemerintah adalah menyediakan jasa pelayanan umum untuk masyarakat yang secara ekonomis sulit dinilai, seperti: melaksanakan administrasi pemerintah, menjaga kestabilan keamanan negara, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat,

mengatur kebijaksanaan perekonomian negara lainnya. Dengan demikian kegiatan pemerintah berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya.

Untuk memperoleh besarnya nilai barang dan jasa yang dikonsumsi sendiri secara langsung tidak mungkin karena produksi sektor ini tidak ada/tidak dijual. Oleh karena itu untuk dapat memperkirakan besarnya nilai produksi yang di konsumsi sendiri dengan cara menghitung besarnya biaya yang di keluarkan dalam produksi. Biaya yang dimaksud adalah :

1. Pengeluaran pemerintah untuk membayar upah dan gaji pegawai sebagai balas jasa yang diberikan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **belanja pegawai**, dimana pegawai disini mencakup pegawai pemerintah pusat dan pegawai pemerintah daerah, baik sipil maupun militer.
2. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai dalam proses produksi, selanjutnya disebut **belanja barang**. Dalam belanja barang disini, termasuk juga belanja perjalanan dinas pegawai, biaya perbaikan kendaraan dinas, perbaikan kantor dan rumah dinas dan pengeluaran rutin lainnya. Pembelian terhadap barang-barang modal tidak termasuk disini, kecuali pembelian barang-barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan.
3. Pengeluaran pemerintah untuk penyediaan barang-barang strategi seperti bahan pangan dan bahan bakar tidak dimasukkan dalam pengeluaran konsumsi pemerintah, akan tetapi dimasukkan sebagai stok.
4. Pengeluaran **penyusutan** barang-barang modal pemerintah. Besarnya penyusutan diperkirakan dengan menggunakan persentase tertentu terhadap belanja pegawai.

Apabila ketiga macam pengeluaran diatas dijumlahkan dan kemudian dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa pemerintah, maka hasilnya merupakan jumlah pengeluaran konsumsi pemerintah.

Hasil penjualan barang dan jasa meliputi penerimaan barang dan jasa yang dijual pemerintah kepada masyarakat, baik yang pada dasarnya tidak mengambil keuntungan atau kemungkinan dibawah harga pokok, maupun penerimaan penjualan hasil produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan sebagai unit industri (hasil penjualan karcis masuk gedung museum, gedung kesenian, kebun binatang, yang dikelola oleh pemerintah) penjualan buku publikasi, bibit pertanian dan sebagainya.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pengertian konsep pembentukan modal tetap bruto dalam suatu region adalah semua barang modal baru yang digunakan atau di pakai sebagai alat untuk proses produksi disuatu region. Barang-barang modal tersebut dapat diperoleh dengan cara membeli dari luar region, ataupun dari pengadaan di region itu sendiri.

Jenis barang yang dikategorikan kedalam barang-barang modal adalah barang-barang yang mempunyai umur satu tahun atau lebih. Pemakaian adalah penggunaan barang-barang modal tersebut sebagai alat yang tetap dalam proses produksi. Barang-barang yang tidak dapat diproduksi kembali, seperti: tanah, cadangan mineral, tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto. Selanjutnya pengeluaran untuk meningkatkan penggunaan tanah seperti pembukaan hutan untuk dijadikan areal perkebunan, daerah pemukiman, bendungan dan lain-lain, serta untuk perluasan areal pertambangan, semuanya adalah merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto.

Pengeluaran untuk perbaikan barang-barang modal yang mengakibatkan bertambahnya umur pemakaian atau menambah kapasitas produksi dari barang-barang modal tersebut juga merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto. Jadi pengeluaran yang bersifat rutin, seperti pembelian barang-barang yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, tidak termasuk kategori pembentukan modal tetap bruto. Penjualan neto dari barang-barang modal bekas dan barang-barang modal afkiran dari dalam region, juga tidak termasuk pembentukan modal tetap bruto, karena barang tersebut sudah dihitung sebagai barang modal pada pertama kali dibeli. Lain halnya, dengan barang modal bekas yang dibeli dari luar region adalah merupakan pembentukan modal tetap bruto, karena didalam region barang tersebut belum pernah dihitung.

Pembelian atau pembuatan barang tahan lama untuk keperluan perlengkapan militer, seperti: barang-barang untuk pertahanan, tank, persenjataan, bangunan dan barang-barang lainnya, tidak termasuk dalam pembentukan modal, karena bersifat konsumtif.

Pembentukan modal tetap bruto mencakup:

1. Pembentukan modal tetap disektor bangunan yang terdiri atas :
 - a. Bangunan tempat tinggal.
 - b. Bangunan bukan tempat tinggal.

- c. Bangunan atau konstruksi lainnya, seperti: jalan, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringannya, instalasi telekomunikasi, pemancar televisi, bandar udara, pelabuhan laut/sungai, jaringan pipa untuk minyak, gas, air dan lain-lain.
2. Pembentukan modal tetap dalam mesin dan alat-alat perlengkapan, yang terdiri atas:
 - a. Alat-alat transport, seperti: kapal laut, pesawat udara, kereta api, bus, truk dan lain-lain.
 - b. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk industri, listrik dan pertambangan
 - c. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian
 - d. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pembuatan jembatan, jalan dan lain-lain
 - e. Mesin-mesin dan perabot untuk keperluan kantor, toko, hotel, restoran, rumah sakit dan lain-lain.
 3. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras. Pengertian/konsep tanaman keras disini adalah bermacam-macam tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah berumur satu tahun atau lebih. Termasuk disini, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh perkebunan besar selama perkebunan itu belum mendatangkan hasil/kegiatan, dan penanaman kembali (reboisasi) yang dilakukan pemerintah/perusahaan.
 4. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil: susunya, bulunya atau dipakai tenaganya, kecuali ternak yang dipelihara untuk dipotong.
 5. Margin perdagangan atau makelar, service charge dan ongkos-ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak perusahaan hutan, hak paten, hak cipta termasuk dalam pembentukan modal tetap.

Dalam hal bangunan atau konstruksi yang karena jangka waktu penyelesaiannya ada yang lebih dari satu tahun, sehingga bangunan tersebut pada waktu penghitungan pembentukan modal masih dalam pengerjaan (belum selesai seluruhnya), maka yang harus di hitung adalah bagian yang sudah selesai saja dari bangunan tersebut, dengan memperkirakan nilainya. Perkiraan nilai dari bangunan yang sudah selesai ini, adalah merupakan pembentukan modal tetap pada tahun tersebut. Selanjutnya, mengenai

mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang dalam proses pembuatan, tidak termasuk dalam penghitungan modal tetap bruto, merupakan stok dari produsennya.

2.5 Perubahan Stok

Pengertian stok disini adalah persediaan barang-barang pada akhir tahun, baik berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik barang yang sudah jadi maupun yang sedang dalam proses. Pemerintah adalah salah satu pemegang stok barang keperluan strategis, seperti: bahan pangan yang akan dikeluarkan kepasar pada waktu krisis. Pemegang stok yang lain adalah produsen dan pedagang. Stok pada produsen pada umumnya berupa bahan mentah, barang-barang atau alat-alat yang diproduksi tetapi masih dalam proses atau barang-barang yang belum dipasarkan.

2.6 Ekspor dan Impor

Ekspor dan impor meliputi transaksi barang dan jasa antara masyarakat suatu region dengan masyarakat region lain (termasuk dengan negara lain). Transaksi tersebut meliputi ekspor dan impor barang, pengangkutan, komunikasi, jasa-jasa asuransi dan berbagai jasa lainnya, seperti: jasa perdagangan yang diterima oleh pedagang region tersebut yang kegiatannya mengadakan transaksi dari beberapa barang tertentu, seperti: barang dan jasa yang langsung di beli di pasar domestik yang dilakukan oleh bukan penduduk region tersebut.

Transaksi barang dan jasa yang dimaksud adalah semua barang dan jasa yang meliputi batas geografis suatu region atau negara, termasuk daerah pabean dan daerah bebas pajak. Penjualan dan pembelian pesawat terbang dan kapal laut, baik yang baru maupun yang bekas, ke atau dari suatu negara atau region lain, adalah merupakan kegiatan ekspor dan impor barang. Barang-barang yang melintasi batas geografis suatu region, akan tetapi hanya merupakan tempat persinggahan saja dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, misalnya: barang-barang untuk peragaan, barang-barang sebagai bahan penyelidikan, contoh, barang-barang milik turis atau penumpang tidak termasuk kegiatan ekspor dan impor. Barang-barang keperluan pelayaran atau penerbangan yang

di beli pada waktu merapat atau mendarat di pelabuhan luar negeri atau region dan ikan yang langsung dijual oleh kapal-kapal penangkap ikan milik penduduk atau region kepada kapal asing atau region lain, adalah merupakan transaksi barang dan jasa yang harus dimasukkan dalam ekspor dan impor.

<http://sulut.bps.go.id>

BAB III

METODE PENGHITUNGAN DAN SUMBER DATA

3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Sumber data utama untuk memperkirakan nilai konsumsi rumah tangga, adalah berasal dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Propinsi Sulawesi Utara, untuk besaran konsumsi didapat dari hasil pengolahan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Pusat. Sedangkan untuk harga setiap jenis bahan yang dikonsumsi, nilainya diperoleh dari hasil pengolahan BPS Propinsi Sulawesi Utara.

Dari hasil SUSENAS, diperoleh rata-rata konsumsi bahan makanan per kapita per minggu dan rata-rata nilai konsumsi non makanan per kapita per bulan. Untuk memperoleh nilai konsumsi bahan makanan sebulan adalah dengan mengalikan nilai konsumsi per kapita per minggu dengan angka tiga puluh yang kemudian dibagi dengan angka tujuh. Sedangkan untuk memperkirakan nilai konsumsi bahan makanan dan bukan makanan setahun diperoleh dengan cara mengalikan nilai konsumsi per kapita per bulan dengan angka dua belas kemudian dikalikan kembali dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Perkiraan nilai konsumsi rumah tangga, untuk tahun yang tidak tersedia data SUSENAS, adalah dengan membuat kecenderungan pergerakan nilai konsumsi tahunan dan dengan memperhatikan kenaikan laju inflasi. Perhitungan ini berlaku baik untuk bahan makanan maupun untuk bukan makanan.

Nilai konsumsi rumah tangga untuk bukan makanan atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mendeflasikan nilai berlakunya, yaitu membagi konsumsi harga berlaku dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum pada tahun yang bersangkutan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang berasal dari SUSENAS ini, telah dilengkapi dengan perkiraan besarnya konsumsi makanan/minuman yang di konsumsi di luar rumah.

3.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit (Nirlaba)

Perkiraan besarnya nilai konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung diperoleh dari hasil penghitungan pendapatan regional menurut lapangan usaha sektor jasa-jasa. Sektor jasa-jasa ini, meliputi: jasa sosial kemasyarakatan yang di kategorikan sebagai lembaga swasta yang tidak mencari untung, seperti: kegiatan sarana kesehatan, panti asuhan, sekolah dan tempat ibadah. Sedangkan untuk kegiatan lainnya seperti dokter praktek, bidan/dukun bayi dan tukang gigi tidak di masukkan dalam kategori ini.

Dari hasil penghitungan Nilai PDRB menurut lapangan usaha, diperoleh perkiraan nilai konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000.

3.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Data mengenai belanja pegawai, belanja barang dan belanja rutin lainnya, serta perkiraan belanja pembangunan yang merupakan belanja rutin, diperoleh dari realisasi pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah pusat diperoleh dari Kantor Perbendaharaan Negara sedangkan untuk pengeluaran pemerintah dalam hal ini daerah otonom tingkat I, tingkat II dan tingkat desa diperoleh dari daftar K.1, K.2 dan K.3.

Kalau diteliti lebih lanjut, pengeluaran pemerintah terdiri dari dua kelompok, yaitu: pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi dan pengeluaran lainnya. Dari kelompok pengeluaran rutin yang di hitung sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah adalah belanja pegawai, belanja barang dan pengeluaran rutin lainnya. Sedangkan yang lainnya tidak dimasukkan karena pengeluaran disini merupakan transfer.

Dari kelompok pengeluaran pembangunan yang tujuan utamanya untuk peningkatan fisik di segala bidang merupakan investasi pemerintah. Tetapi pembiayaan yang bersifat rutin, seperti: pengeluaran untuk riset, dan pengeluaran untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dimasukkan sebagai konsumsi pemerintah.

3.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Ditinjau dari sudut pemilikan, pembentukan modal tetap bruto dapat dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing lapangan usaha (sektor). Sedangkan kalau ditinjau dari jenis barang modal itu sendiri, maka pembentukan modal dapat di hitung berdasarkan arus barang.

Perkiraan pembentukan modal tetap bruto atas dasar harga yang berlaku, diperoleh dengan cara menghitung nilai barang-barang modal yang masuk ke region, dan barang modal yang masuk antar region atau antar pulau, ditambahkan dengan persentase tertentu terhadap nilai produksi bruto sektor konstruksi/bangunan.

Perkiraan nilai pembentukan modal tetap bruto atas dasar harga konstan tahun 2000, diperoleh dengan cara mendeflasikan nilai pembentukan modal tetap bruto (nilai barang impor) atas dasar harga yang berlaku dengan indeks harga perdagangan besar impor, dan dengan indeks harga perdagangan besar sektor industri untuk barang modal antar pulau.

3.5. Perubahan Stok

Perubahan stok pada suatu tahun diperoleh dari seluruh nilai stok pada akhir tahun dikurangi dengan seluruh nilai stok pada akhir tahun sebelumnya (pada awal tahun yang bersangkutan). Dalam menghitung perubahan stok dapat dilakukan dengan dua metode yakni :

1. Metode Langsung.

Nilai stok diperoleh dari setiap kegiatan dan jenis barang yang dikumpulkan melalui sensus dan survei. Berdasarkan laporan neraca keuangan perusahaan, dari hasil survei tahunan, diperoleh nilai stok pada awal tahun dan akhir tahun yang kemudian dinilai dengan rata-rata harga pasar pada periode tahun perhitungan tersebut.

2. Metode Tidak Langsung (metode Arus Barang)

Yaitu dengan menghitung stok awal dan stok akhir dari tiap jenis barang. Data seperti ini hanya tersedia untuk beberapa jenis barang. Oleh karena itu maka komponen perubahan stok diestimasi berdasarkan residual dari Produk Domestik

regional Bruto (PDRB) yang di hitung secara sektoral dikurangi komponen-komponen yang sudah dihitung dengan data yang tersedia.

Perubahan stok penghitungannya ditaksir sebagai residual karena tidak tersedianya data yang diperlukan untuk membuat perkiraan perubahan stok. Dengan demikian, stok merupakan sisa, yaitu PDRB yang telah dihitung menurut lapangan usaha dikurangi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto dan ekspor netto (ekspor – impor) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

3.6. Ekspor dan Impor

Data yang tersedia mengenai ekspor dan impor ditingkat region masih sangat terbatas. Ekspor dan Impor ditingkat region ini, meliputi: transaksi yang dilakukan langsung dengan luar negeri, dan antar pulau atau antar propinsi. Dari nilai ekspor dan impor luar negeri maupun antar pulau masing-masing tahun diperoleh nilai ekspor dan impor atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh nilai ekspor atas dasar harga konstan 2000 dengan cara sebagai berikut: a) nilai ekspor dideflate dengan indeks harga perdagangan besar umum ekspor tanpa minyak, dan b) nilai impor dideflate dengan indeks harga perdagangan besar umum kelompok impor.

Nilai barang yang keluar antar pulau atau antar region atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mendeflate masing-masing dengan Indeks Harga Perdagangan Besar umum.

Data mengenai ekspor dan impor luar negeri diperoleh dari statistik tahunan ekspor dan Impor terbitan dari Departemen Perdagangan. Sedangkan untuk barang yang keluar dan masuk antar pulau/propinsi diperoleh dengan cara menghitung selisih produksi domestik dengan konsumsi domestik. Konsumsi domestik terdiri dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi industri.

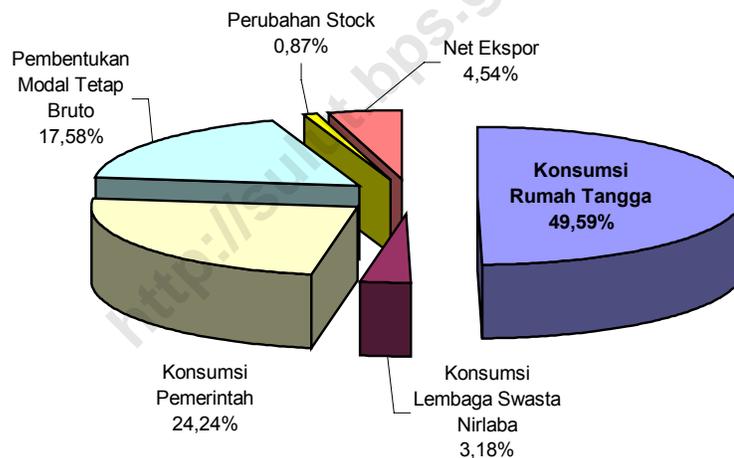
BAB IV

TINJAUAN PDRB PROPINSI SULAWESI UTARA

DARI PENDEKATAN PENGGUNAAN

Perekonomian Propinsi Sulawesi Utara yang bertumbuh sebesar 4,90% di tahun 2005, dilihat dari sisi penggunaan, masih didominasi oleh konsumsi (rumah tangga, lembaga swasta nirlaba, dan pemerintah) dimana kontribusinya terhadap total PDRB sebesar 77%. Sedangkan sisanya sebesar 23% merupakan kontribusi pembentukan modal tetap bruto, perubahan stock, dan net ekspor barang dan jasa.

Gambar 1.
Distribusi Komponen PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2005
(Persen)



Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap total nilai PDRB merupakan yang terbesar yakni 49,59%. Konsumsi pemerintah dan konsumsi lembaga swasta nirlaba masing-masing kontribusinya sebesar 24,24% dan 3,18% terhadap nilai total PDRB.

Sementara porsi pembentukan modal tetap bruto dari total nilai PDRB yang terbentuk sebesar 17,58% dan net ekspor barang dan jasa kontribusinya masih 4,54% dari total nilai PDRB.

4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

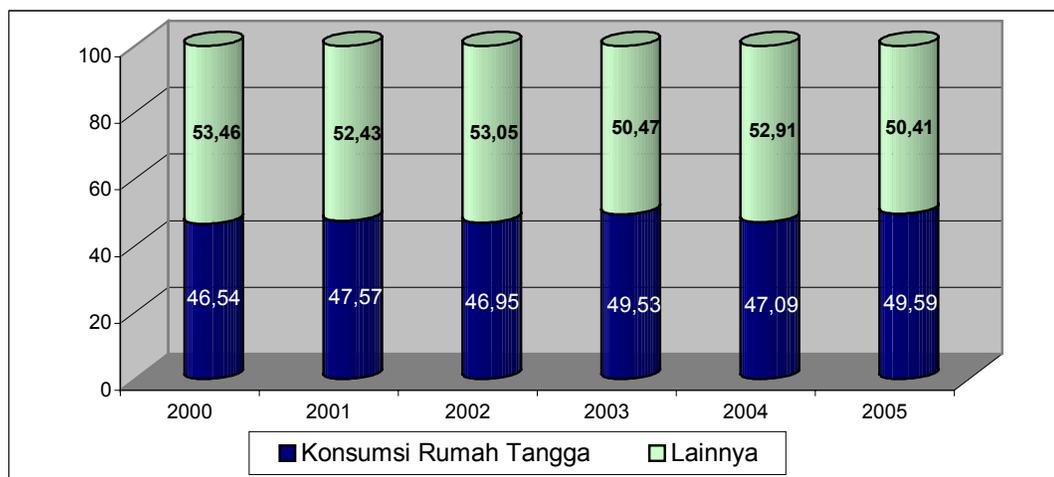
Pengeluaran konsumsi rumahtangga merupakan komponen yang dominan dalam PDRB menurut penggunaan. Dimana kontribusinya terhadap total nilai PDRB dari tahun ke tahun relatif cenderung mengalami peningkatan.

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB selama tahun 2000 - 2005 dapat dilihat pada Tabel 1. Rata-rata persentase konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB baik atas dasar harga berlaku sepanjang kurun waktu 2000 – 2005 sebesar 47,88%.

Kontribusi terbesar merupakan konsumsi rumah tangga terjadi di tahun 2005 dimana nilainya hampir mencapai separuh dari total nilai PDRB (49,59%). Nilai kontribusi tersebut juga hampir sama besar dengan nilai kontribusi yang tercatat di tahun 2003 (49,53%).

Sementara nilai kontribusi konsumsi rumah tangga paling kecil terjadi di tahun 2000 (46,54%). Dimana nilai tersebut hampir sama besar dengan nilai kontribusi konsumsi terhadap total nilai PDRB yang tercatat di tahun 2002 (46,95%).

Gambar 2.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2000 – 2005



Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kelompok non makanan, dalam periode waktu 2000-2005, relatif cenderung mengalami peningkatan.

Tabel 1.
Komposisi Penggunaan PDRB ADHB dan ADHK 2000
Tahun 2000 – 2005
(persen)

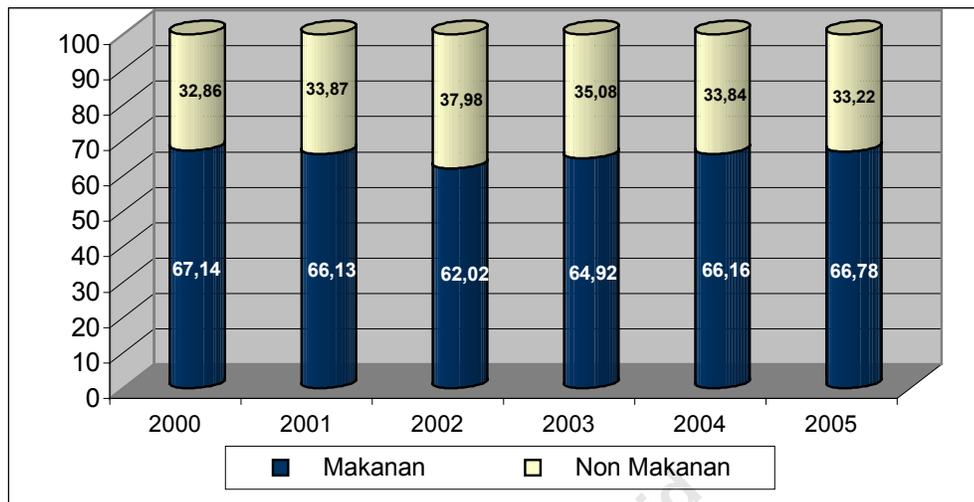
Tahun	ADHB		ADHK	
	Konsumsi Rumah Tangga	Lainnya	Konsumsi Rumah Tangga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000	46,54	53,46	46,54	53,46
2001	47,57	52,43	46,70	53,30
2002	46,95	53,05	46,84	53,16
2003	49,53	50,47	48,18	51,82
2004	47,09	52,91	47,03	46,59
2005	49,59	50,41	52,97	53,41

Tahun 2000 persentase konsumsi untuk kelompok makanan sebesar 67,14% terhadap total konsumsi rumah tangga, dan sisanya (32,86%) merupakan konsumsi untuk kelompok non makanan. Tahun 2001 dan 2002, persentase konsumsi untuk makanan persinya semakin mengecil masing-masing sebesar 66,13% dan 66,02% dan disisi lain persentase konsumsi kelompok non makanan persinya semakin membesar masing-masing sebesar 33,87% dan 37,98%.

Tabel 2.
Struktur Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga ADHB dan ADHK
Tahun 2000 -2005
(Persen)

Tahun	ADHB			ADHK		
	Makanan	Non Makanan	Konsumsi Rumah Tangga	Makanan	Non Makanan	Konsumsi Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2000	67,14	32,86	100,00	67,14	32,86	100,00
2001	66,13	33,87	100,00	67,50	32,50	100,00
2002	62,02	37,98	100,00	65,71	34,29	100,00
2003	64,92	35,08	100,00	67,53	32,47	100,00
2004	66,16	33,84	100,00	67,76	32,24	100,00
2005	66,78	32,22	100,00	68,42	31,58	100,00

Gambar 3.
Grafik Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga ADHB
Tahun 2000-2005



Periode 2002-2005, porsi konsumsi untuk kelompok makanan semakin membesar dari tahun ke tahun dan sebaliknya porsi konsumsi untuk kelompok non makanan semakin mengecil.

Tahun 2005 konsumsi untuk kelompok makanan sebesar 66,78 % dan sisanya sebesar 33,22% merupakan porsi kelompok non makanan.

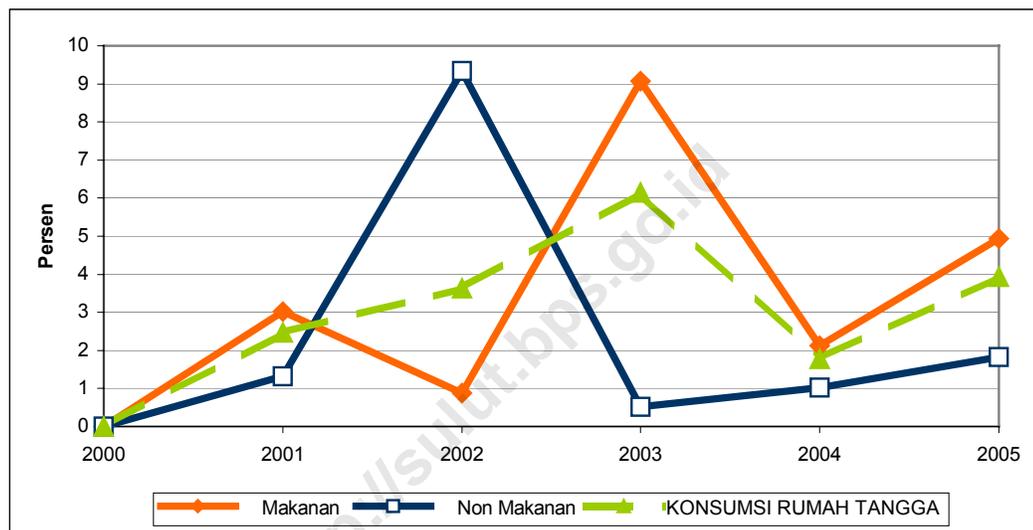
Tabel 3.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2000 - 2005

Rincian		2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ADHB (Milyar Rupiah)	Konsumsi Rumah Tangga	4.981	5.573	5.961	6.807	7.218	8.834
	Makanan	3.344	3.685	3.697	4.420	4.775	5.899
	Non Makanan	1.637	1.888	2.264	2.388	2.442	2.935
ADHK (Milyar Rupiah)	Konsumsi Rumah Tangga	4.981	5.104	5.289	5.614	5.713	5.938
	Makanan	3.344	3.445	3.475	3.791	3.872	4.063
	Non Makanan	1.637	1.659	1.814	1.823	1.842	1.875
Pertumbuhan (Persen)	Konsumsi Rumah Tangga	-	2,47	3,63	6,15	1,77	3,94
	Makanan	-	3,02	0,88	9,08	2,13	4,94
	Non Makanan	-	1,33	9,34	0,52	1,03	1,82

Catt :Perhitungan atas dasar harga konstan 2000

Perkembangan nilai konsumsi rumah tangga selama periode tahun 2000-2005, dapat dilihat pada Tabel 3, terus mengalami kenaikan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Konsumsi rumah tangga pada tahun 2000 bila dilihat menurut harga berlaku sebesar 4.981 milyar rupiah baik atas dasar harga berlaku dan harga konstan, pada tahun 2005 meningkat menjadi 8.834 milyar rupiah atas dasar harga berlaku dan sebesar 5.938 milyar rupiah atas dasar harga konstan.

Gambar 4.
Grafik Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga
Tahun 2000-2005



Laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga (dihitung berdasarkan atas dasar harga konstan 2000) dari tahun 2000 hingga tahun 2005 mengalami kenaikan yang relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 3,59 persen per tahun.

Tingkat pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2001 sebesar 2,47%, pada tahun 2002 mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 3,63%, tahun 2003 juga mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 6,15% bahkan angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam periode waktu 2000 – 2005. Sementara tahun 2005, konsumsi rumah tangga bertumbuh lebih cepat (3,94%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni bertumbuh sebesar 1,77% dimana angka ini merupakan pertumbuhan yang paling rendah dalam periode waktu 2000-2005.

Jika dilihat pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada sub kelompok makanan, angka pertumbuhan yang terbesar 9,08 % tahun 2003 dan yang terkecil 0,88% tahun 2002. Sebaliknya pada sub kelompok non makanan angka pertumbuhan yang tertinggi sebesar 9,34% tahun 2002, dan terendah 0,52% tahun 2003.

Tahun 2005, angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada sub kelompok makanan sebesar 4,94% dan sub kelompok non makanan sebesar 1,82%.

4.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit

Peranan lembaga swasta nirlaba dalam penggunaan PDRB sepanjang kurun waktu 2000 – 2005 terlihat masih relatif kecil yakni masih dibawah 4% persen dengan rata-rata kontribusi setiap tahun sebesar 3,40% terhadap total PDRB.

Tabel 4.
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
Tahun 2000-2005

Uraian	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai (Milyar Rp)						
ADH Berlaku	386	422	461	433	494	567
ADH Konstan 00	386	399	417	361	375	396
Persen						
Laju Pertumbuhan ¹⁾	-	3,34	4,59	(13,39)	3,68	5,72
Kontribusi ²⁾	3,61	3,60	3,64	3,15	3,22	3,18

1) Perhitungan atas dasar harga konstan 2000

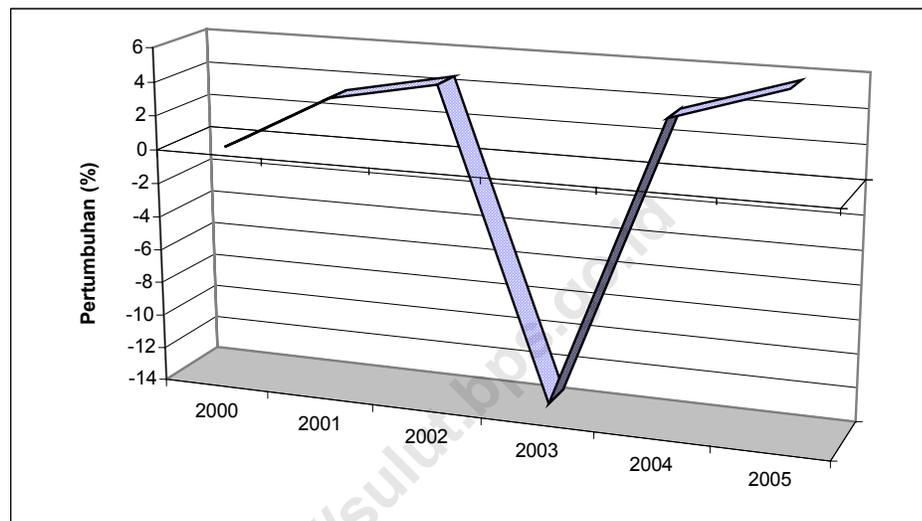
2) Perhitungan atas dasar harga berlaku

Dilihat dari nilai penggunaannya baik atas dasar harga berlaku maupun konstan (lihat Tabel 4.), sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Akan tetapi pada tahun 2003 perkembangan nilai konsumsi lembaga swasta non profit atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara ditahun 2004 dan 2005 mengalami peningkatan dan bahkan nilainya lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara, dilihat dari nilai konsumsi lembaga swasta non profit atas dasar harga konstan di tahun 2003 nilainya lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan

paling rendah dalam periode waktu 2000-2005, di tahun 2004 dan 2005 nilainya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan tetapi peningkatan tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan nilai konsumsi pada tahun 2001 dan 2002.

Tahun 2005, nilai penggunaan PDRB untuk konsumsi lembaga swasta non profit sebesar 567 milyar atas dasar harga berlaku dan 396 milyar atas dasar harga konstan.

Gambar 5.
Grafik Laju Pertumbuhan Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
Tahun 2000-2005



Pertumbuhan konsumsi lembaga swasta nirlaba selama periode tahun 2000-2002 mengalami kenaikan. Akan tetapi di tahun 2003, pertumbuhan konsumsi lembaga swasta nirlaba menurun tajam sebesar $-13,39\%$.

Periode waktu 2003-2005, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kembali mengalami peningkatan. Tahun 2005 konsumsi lembaga swasta nirlaba bertumbuh sebesar $5,72\%$.

4.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Kontribusi konsumsi pemerintah sepanjang kurun waktu 2000-2005 relatif semakin membesar dari tahun ke tahun. Tahun 2000 penggunaan PDRB untuk konsumsi pemerintah sebesar 15% , tahun 2001 dan 2002 kontribusinya menjadi 19% . Sementara tahun 2003 –2005 kontribusi konsumsi pemerintah juga semakin membesar yakni diatas 20% . Dimana rata-rata kontribusi konsumsi pemerintah terhadap total PDRB dalam kurun waktu 2000-2005 adalah $20,28\%$ per tahun.

Tabel 5.
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Tahun 2000-2005

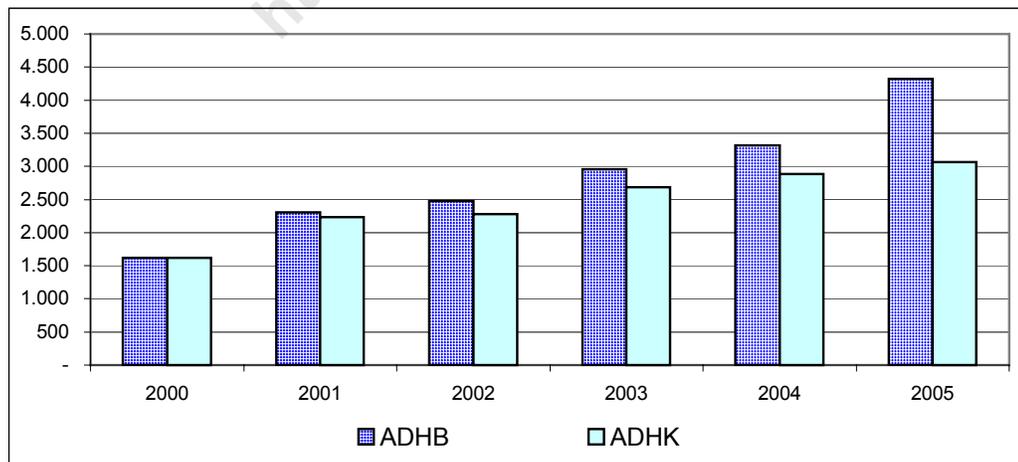
Uraian	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai (Milyar Rp)						
ADH Berlaku	1.620	2.302	2.480	2.953	3.314	4.318
ADH Konstan 2000	1.620	2.234	2.277	2.687	2.882	3.063
Persen						
Laju Pertumbuhan ¹⁾	-	37,90	1,92	18,00	7,28	6,27
Kontribusi ²⁾	15,14	19,65	19,54	21,49	21,62	24,24

1) Perhitungan atas dasar harga konstan 2000

2) Perhitungan atas dasar harga berlaku

Jika dilihat dari penggunaannya, nilai konsumsi pengeluaran pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 2000-2004 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sampai pada tahun 2005 nilai konsumsi pemerintah 4.318 milyar rupiah atas dasar harga berlaku dan 3.063 milyar rupiah atas dasar harga konstan.

Gambar 6.
Grafik Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Tahun 2000 - 2005
(milyar rupiah)



Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan yang sangat berfluktuasi sejak tahun 2000-2005 (lihat Tabel 5), dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 14,27% setiap tahun. Laju pertumbuhan yang tertinggi

sebesar 37,90% terjadi pada tahun 2001 dan laju pertumbuhan yang terendah terjadi pada tahun 2002 sebesar 1,92%.

Sementara laju pertumbuhan konsumsi pemerintah (6,27%) di tahun 2005 bertumbuh lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (7,28%).

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Penggunaan untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) baik dilihat atas dasar harga berlaku selama tahun 2000-2005 terus mengalami peningkatan (Tabel 6). Investasi fisik yang terjadi di Propinsi Sulawesi Utara tahun 2000 sebesar 1.747 milyar, meningkat menjadi 1.985 milyar di tahun 2001. Sampai tahun 2005 nilai investasi fisik yang terbentuk sebesar 3.133 milyar rupiah.

Jika dilihat berdasarkan harga konstan, nilai pembentukan modal tetap bruto yang terjadi di propinsi Sulawesi Utara pada kurun waktu 2000-2002 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2003 nilai pembentukan modal tetap bruto sebesar 1.912 milyar rupiah sedikit lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2002 yang bernilai sebesar 1.986 milyar rupiah. Pada tahun 2004 dan 2005 nilai pembentukan modal tetap bruto lebih besar yakni masing –masing sebesar 2.041 milyar dan 2.309 milyar rupiah.

Tabel 6.
Pembentukan Modal Tetap Bruto
Tahun 2000 - 2005

Uraian	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai (Milyar Rp)						
ADH Berlaku	1.747	1.985	2.193	2.377	2.564	3.133
ADH Konstan 2000	1.747	1.873	1.986	1.912	2.041	2.309
Persen						
Laju Pertumbuhan ¹⁾	-	7,24	6,04	(3,72)	6,74	13,11
Kontribusi ²⁾	16,32	16,94	17,28	17,29	16,73	17,58

1) Perhitungan atas dasar harga konstan

2) Perhitungan atas dasar harga berlaku

Awalnya, periode 2000-2005, perkembangan investasi fisik cukup menggebu-gebu dimana pertumbuhannya di tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar 7,24%. Akan tetapi di tahun 2003, pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar -3,72%.

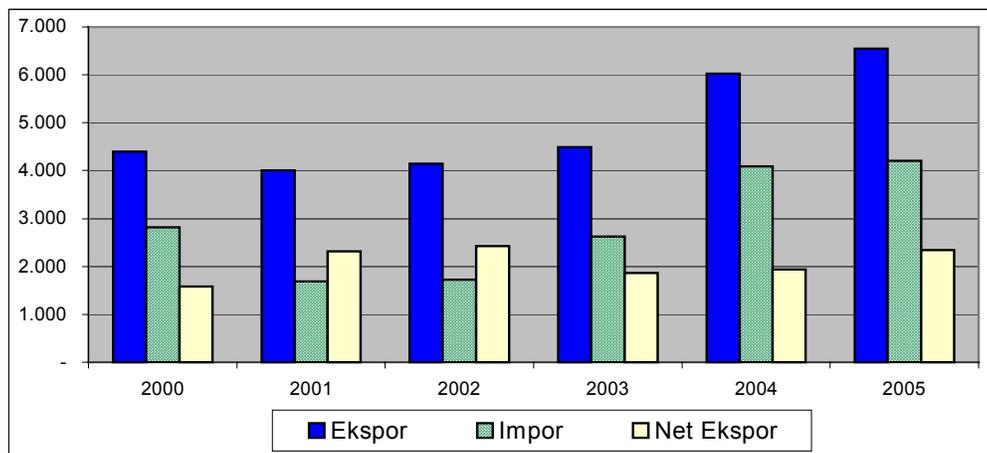
Pembentukan modal tetap bruto pada dua tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup berarti dimana pertumbuhannya dari tahun ke tahun semakin mengalami percepatan masing-masing sebesar 6,74% dan 13,11%. Pertumbuhan di tahun 2005 tersebut merupakan pertumbuhan yang paling tinggi dalam periode 2000-2005.

Kontribusi komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2005 relatif semakin membesar walaupun masih berada dalam kisaran 16-18 persen. Dimana rata-rata penggunaan PDRB untuk investasi fisik sebesar 17,02% per tahun. Sumbangan pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB mencapai puncaknya di tahun 2005 sebesar 17,58% .

4.5 Ekspor dan Impor

Nilai ekspor barang dan jasa propinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu 2000 – 2005 selalu lebih besar dibandingkan dengan nilai impor barang dan jasa. Perkembangan ekspor maupun impor barang dan jasa terhadap total PDRB menurut harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada Tabel 7.

Gambar 7.
Nilai Ekspor, Net Ekspor dan Impor Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2000-2005
(milyar rupiah)



Tabel 7.
Ekspor dan Impor Barang dan Jasa
Tahun 2000-2005

Uraian	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai (Milyar Rp)						
ADH Berlaku						
Ekspor barang & Jasa	4.403	4.004	4.145	4.498	6.026	6.542
Impor barang & Jasa	2.819	2.780	2.789	3.441	4.427	5.734
ADH Konstan 2000						
Ekspor barang & Jasa	4.403	2.822	2.822	3.600	5.096	5.139
Impor barang & Jasa	2.819	1.688	1.719	2.629	4.087	4.202
Persen						
Pertumbuhan ¹⁾						
Ekspor barang & Jasa	-	(35,91)	0,02	27,55	41,56	0,85
Impor barang & Jasa	-	(40,12)	1,85	52,92	55,46	2,81
Kontribusi ²⁾						
Ekspor barang & Jasa	41,15	34,18	32,65	32,72	39,32	36,72
Impor barang & Jasa	26,34	23,73	21,97	25,03	28,89	32,19

1) Perhitungan atas dasar harga konstan 2000

2) Perhitungan atas dasar harga berlaku

4.5.1 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa

Perkembangan nilai ekspor barang dan jasa relatif cenderung mengalami kenaikan baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.

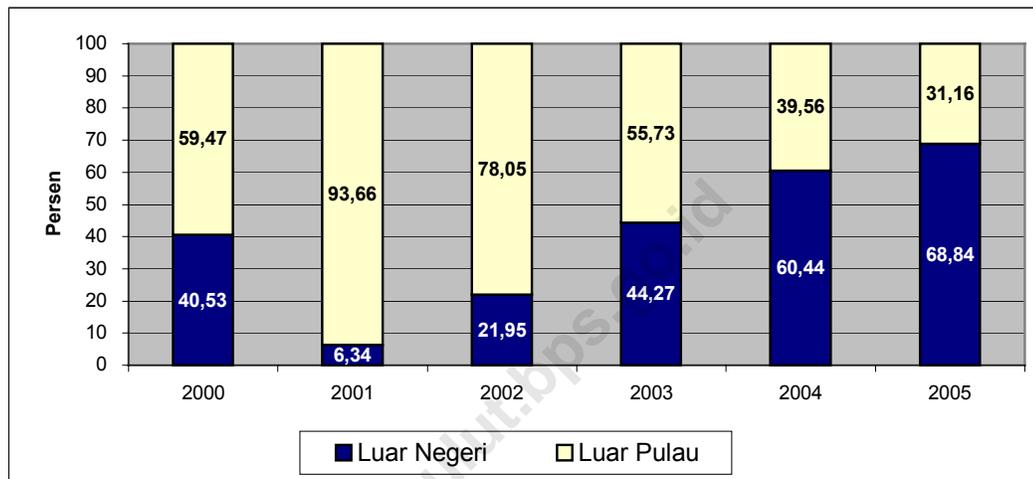
Periode 2000-2003 nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga berlaku tercatat berada dalam kisaran 4 milyar sampai dengan 4,5 milyar rupiah. Dua tahun terakhir nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai lebih dari 6 milyar rupiah. Dimana angka ekspor atas dasar harga berlaku sebesar 6.542 milyar rupiah merupakan angka terbesar dalam periode waktu 2000-2005.

Ekspor barang dan jasa masih didominasi oleh ekspor antar Propinsi (perdagangan luar daerah). Dalam kurun waktu 2000-2005, hampir 60% rata-rata pertahunnya merupakan ekspor antar pulau dan sisanya sekitar 40% merupakan ekspor ke luar negeri.

Perbandingan perdagangan antar pulau dengan perdagangan luar negeri di tahun 2000 hampir sebanding. Ditahun 2001, perbandingan tersebut berbeda cukup tajam, dimana perdagangan antar pulau cukup mendominasi yakni hampir 94% dari total nilai ekspor

yang ada. Ekspor ke luar negeri mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam periode 2002-2005, dimana kontribusinya terhadap total nilai ekspor mengalami perkembangan yang cukup berarti dari tahun ke tahun. Kontribusi ekspor luar negeri mencapai puncaknya di tahun 2005 yakni sebesar 68,84% dari total nilai ekspor .

Gambar 8.
 Persentase Perbandingan Ekspor Luar Negeri dan Luar Propinsi Terhadap Nilai Total Ekspor Tahun 2000-2005
 (milyar rupiah)



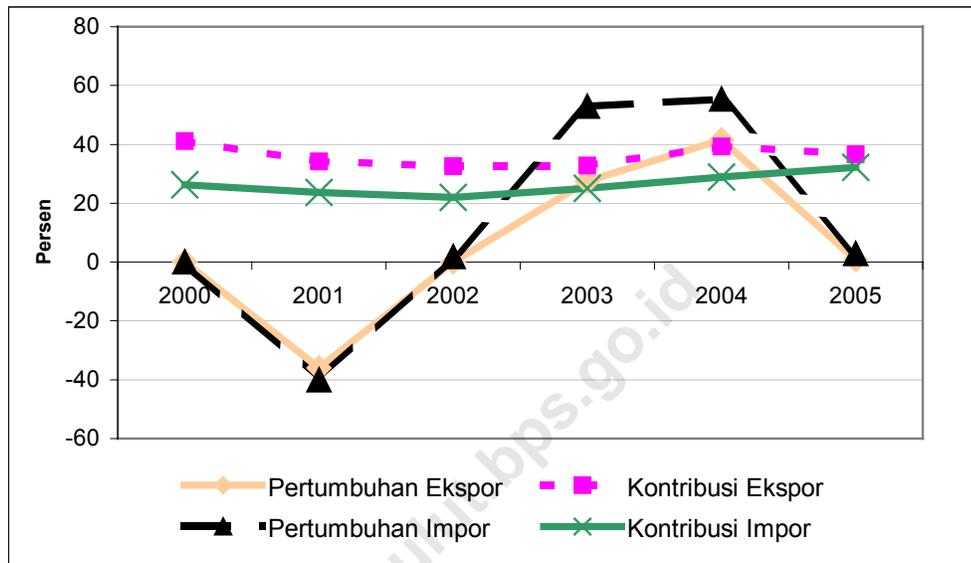
Rata-rata kontribusi ekspor barang dan jasa setiap tahun adalah sebesar 36,12% dimana besar kontribusi tersebut cenderung semakin mengecil dalam kurun waktu 2000-2005. Nilai kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap total PDRB terbesar 41,15% di tahun 2000. Ditahun-tahun selanjutnya sumbangan ekspor barang dan jasa terhadap total nilai PDRB nilainya tidak mencapai 40%.

Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap total nilai PDRB berada dalam kisaran 32 – 42 persen, dengan rata-rata pertahunnya sebesar 36,12%. Tahun 2005, kontribusinya sebesar 36,72% lebih kecil dari nilai kontribusi tahun sebelumnya (39,32%).

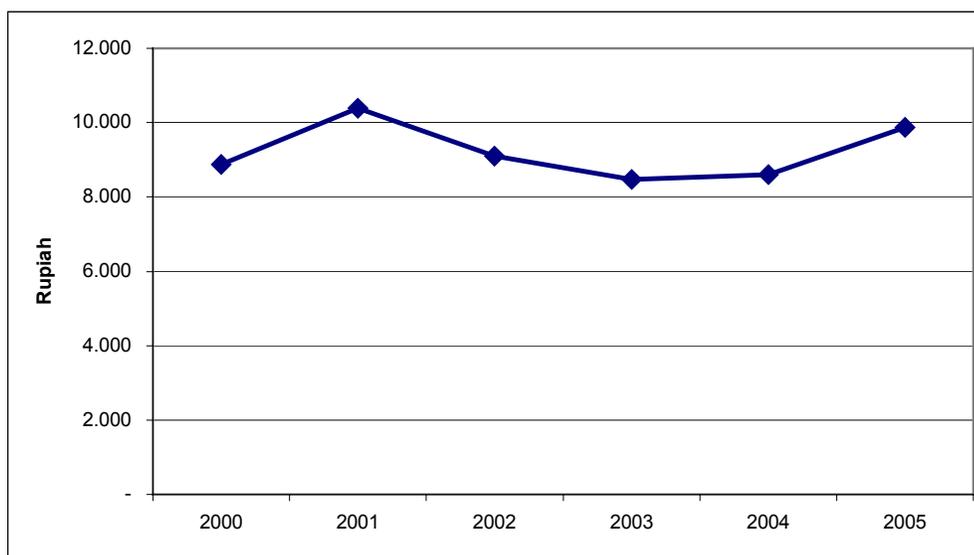
Tahun 2001, baik ekspor maupun impor barang dan jasa pertumbuhannya mengalami penurunan yang sangat tajam. Hal tersebut tampaknya sebagai dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Laju pertumbuhan ekspor selalu mengalami kenaikan setelah bertumbuh negatif di tahun 2001 (-35,91%) dengan rata-rata pertumbuhan 6,81% pertahun. Akan tetapi pertumbuhan di tahun 2005 mengalami perlambatan dimana pertumbuhannya hanya sebesar 0,85%.

Gambar 9.
Pertumbuhan dan kontribusi ekspor dan Impor
Tahun 2000-2005
(persen)



Gambar 10.
Grafik Perkembangan Kurs Tengah \$US
Tahun 2000-2005
(Rupiah)



4.5.1 Perkembangan impor barang dan jasa

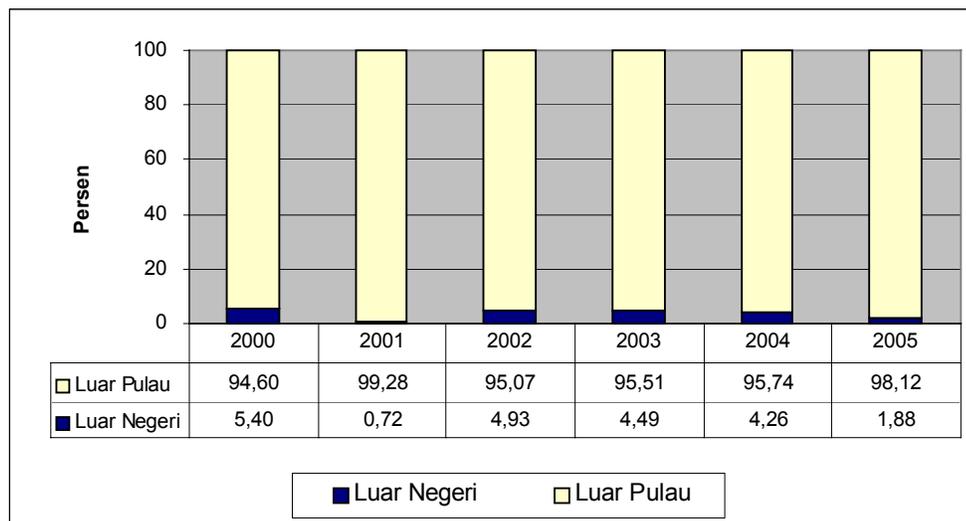
Pertumbuhan impor barang dan jasa relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor barang dan jasa dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 14,58%.

Setelah bertumbuh negatif sebesar -40,12 % ditahun 2001 sebagai akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, pertumbuhan impor barang dan jasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan cenderung mengalami percepatan. Dimana pertumbuhannya di tahun 2003 hampir mencapai 53% dan meningkat lagi hampir mencapai 56% ditahun 2004. Tahun 2005, pertumbuhannya mengalami perlambatan yakni hanya bertumbuh sebesar 2,81%.

Impor barang dan jasa tersebut didominasi oleh impor dari luar pulau. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap total nilai impor barang dan jasa lebih dari 94% setiap tahunnya. Impor barang dan jasa yang berasal dari luar negara porsinya hanya dibawah 6%.

Nilai impor barang dan jasa relatif cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai pada tahun 2005 nilai impor barang dan jasa sebesar 5.734 milyar rupiah atas dasar harga berlaku dan 4.202 milyar rupiah atas dasar harga konstan.

Gambar 11.
Persentase Impor Luar Negeri dan Luar Propinsi Terhadap Nilai Total Impor Tahun 2000-2005
(milyar rupiah)



<http://sulut.bps.go.id>

L

A

M

P

I

R

A

N

TABEL 1.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 PROPINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU
 TAHUN 2000 - 2005
 (Jutaan Rupiah)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	4.980.835,00	5.572.855,00	5.960.549,00	6.807.471,00	7.217.814,00	8.833.731,79
Makanan	3.343.905,00	3.685.140,00	3.696.546,00	4.419.645,00	4.775.345,28	5.899.036,69
Non Makanan	1.636.930,00	1.887.715,00	2.264.003,00	2.387.826,00	2.442.468,72	2.934.695,10
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	385.944,00	422.112,00	461.488,00	432.732,00	494.136,00	566.921,56
KONSUMSI PEMERINTAH	1.619.840,00	2.301.732,00	2.479.990,00	2.953.305,00	3.314.435,00	4.318.413,50
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	1.746.800,00	1.984.808,00	2.193.217,00	2.376.640,00	2.564.253,00	3.132.546,11
PERUBAHAN STOK *	383.743,00	209.613,00	243.364,00	117.436,00	138.329,00	154.885,75
EKSPOR	4.402.981,44	4.003.860,81	4.145.073,65	4.497.744,73	6.026.045,75	6.542.449,90
Antar Negara	1.784.444,00	209.372,00	634.783,00	1.519.575,00	2.985.684,00	3.833.739,21
Antara Pulau/Propinsi	2.618.537,44	3.794.488,81	3.510.290,65	2.978.169,73	3.040.361,75	2.708.710,69
IMPOR	2.819.010,20	2.779.630,00	2.788.966,16	3.440.670,54	4.427.435,35	5.733.825,74
Antar Negara	152.132,00	20.115,00	137.398,00	154.426,00	188.829,00	107.591,59
Antara Pulau/Propinsi	2.666.878,20	2.759.515,00	2.651.568,16	3.286.244,54	4.238.606,35	5.626.234,14
P D R B	10.701.133,24	11.715.350,81	12.694.715,49	13.744.658,20	15.327.577,40	17.815.122,88

TABEL 2.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 PROPINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
 TAHUN 2000 - 2005
 (Jutaan Rupiah)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	4.980.835,00	5.103.687,55	5.288.943,92	5.613.985,50	5.713.432,65	5.938.280,09
Makanan	3.343.905,00	3.445.043,48	3.475.374,96	3.790.895,69	3.871.618,77	4.062.863,69
Non Makanan	1.636.930,00	1.658.644,07	1.813.568,95	1.823.089,82	1.841.813,88	1.875.416,40
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	385.944,00	398.853,00	417.150,00	361.288,00	374.595,00	396.030,92
KONSUMSI PEMERINTAH	1.619.840,00	2.233.780,00	2.276.666,00	2.686.513,00	2.882.117,00	3.062.704,61
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	1.746.800,00	1.873.344,00	1.986.430,00	1.912.481,00	2.041.440,00	2.309.135,75
PERUBAHAN STOK *	383.743,00	185.498,00	219.247,00	107.739,00	128.950,00	100.575,17
EKSPOR	4.402.981,44	2.821.741,94	2.822.177,66	3.599.705,64	5.095.769,03	5.139.328,95
Antar Negara	1.784.444,00	178.897,00	619.602,00	1.593.534,00	3.080.061,00	3.537.961,66
Antara Pulau/Propinsi	2.618.537,44	2.642.844,94	2.202.575,66	2.006.171,64	2.015.708,03	1.601.367,29
IMPOR	2.819.010,20	1.687.928,57	1.719.151,80	2.628.918,77	4.086.802,41	4.201.505,71
Antar Negara	152.132,00	17.187,00	134.112,00	161.942,00	194.798,00	59.244,31
Antara Pulau/Propinsi	2.666.878,20	1.670.741,57	1.585.039,80	2.466.976,77	3.892.004,41	4.142.261,40
P D R B	10.701.133,24	10.928.975,92	11.291.462,78	11.652.793,37	12.149.501,26	12.744.549,77

TABEL 3.

DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 PROPINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU
 TAHUN 2000 - 2005
 (PERSEN)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	46,54	47,57	46,95	49,53	47,09	49,59
Makanan	31,25	31,46	29,12	32,16	31,16	33,11
Non Makanan	15,30	16,11	17,83	17,37	15,94	16,47
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	3,61	3,60	3,64	3,15	3,22	3,18
KONSUMSI PEMERINTAH	15,14	19,65	19,54	21,49	21,62	24,24
PEMBENTUKAN MODAL	16,32	16,94	17,28	17,29	16,73	17,58
PERUBAHAN STOK *	3,59	1,79	1,92	0,85	0,90	0,87
EKSPORT	41,15	34,18	32,65	32,72	39,32	36,72
Antar Negara	16,68	1,79	5,00	11,06	19,48	21,52
Antara Pulau/Propinsi	24,47	32,39	27,65	21,67	19,84	15,20
IMPORT	26,34	23,73	21,97	25,03	28,89	32,19
Antar Negara	1,42	0,17	1,08	1,12	1,23	0,60
Antara Pulau/Propinsi	24,92	23,55	20,89	23,91	27,65	31,58
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TABEL 4.

DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 PROPINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
 TAHUN 2000 - 2005
 (PERSEN)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	46,54	46,70	46,84	48,18	47,03	46,59
Makanan	31,25	31,52	30,78	32,53	31,87	31,88
Non Makanan	15,30	15,18	16,06	15,65	15,16	14,72
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	3,61	3,65	3,69	3,10	3,08	3,11
KONSUMSI PEMERINTAH	15,14	20,44	20,16	23,05	23,72	24,03
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	16,32	17,14	17,59	16,41	16,80	18,12
PERUBAHAN STOK *	3,59	1,70	1,94	0,92	1,06	0,79
EKSPORT	41,15	25,82	24,99	30,89	41,94	40,33
Antar Negara	16,68	1,64	5,49	13,68	25,35	27,76
Antara Pulau/Propinsi	24,47	24,18	19,51	17,22	16,59	12,57
IMPORT	26,34	15,44	15,23	22,56	33,64	32,97
Antar Negara	1,42	0,16	1,19	1,39	1,60	0,46
Antara Pulau/Propinsi	24,92	15,29	14,04	21,17	32,03	32,50
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TABEL 5.

INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 PROPINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU
 (2000 = 100)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	100	111,89	119,67	136,67	144,91	177,35
Makanan	100	110,20	110,55	132,17	142,81	176,41
Non Makanan	100	115,32	138,31	145,87	149,21	179,28
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	100	109,37	119,57	112,12	128,03	146,89
KONSUMSI PEMERINTAH	100	142,10	153,10	182,32	204,61	266,60
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	100	113,63	125,56	136,06	146,80	179,33
PERUBAHAN STOK *	100	54,62	63,42	30,60	36,05	40,36
EKSPORT	100	90,94	94,14	102,15	136,86	148,59
Antar Negara	100	11,73	35,57	85,16	167,32	214,84
Antara Pulau/Propinsi	100	144,91	134,06	113,73	116,11	103,44
IMPORT	100	98,60	98,93	122,05	157,06	203,40
Antar Negara	100	13,22	90,31	101,51	124,12	70,72
Antara Pulau/Propinsi	100	103,47	99,43	123,22	158,94	210,97
P D R B	100	109,48	118,63	128,44	143,23	166,48

TABEL 6.

INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 PROPINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
 (2000 = 100)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	100	102,47	106,19	112,71	114,71	119,22
Makanan	100	103,02	103,93	113,37	115,78	121,50
Non Makanan	100	101,33	110,79	111,37	112,52	114,57
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	100	103,34	108,09	93,61	97,06	102,61
KONSUMSI PEMERINTAH	100	137,90	140,55	165,85	177,93	189,07
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	100	107,24	113,72	109,48	116,87	132,19
PERUBAHAN STOK *	100	48,34	57,13	28,08	33,60	26,21
EKSPORT	100	64,09	64,10	81,76	115,73	116,72
Antar Negara	100	10,03	34,72	89,30	172,61	198,27
Antara Pulau/Propinsi	100	100,93	84,11	76,61	76,98	61,16
IMPORT	100	59,88	60,98	93,26	144,97	149,04
Antar Negara	100	11,30	88,16	106,45	128,05	38,94
Antara Pulau/Propinsi	100	62,65	59,43	92,50	145,94	155,32
PDRB	100	102,13	105,52	108,89	113,53	119,10

TABEL 7.

INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 PROPINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU
 (TAHUN SEBELUMNYA = 100)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	100	111,89	106,96	114,21	106,03	122,39
Makanan	100	110,20	100,31	119,56	108,05	123,53
Non Makanan	100	115,32	119,93	105,47	102,29	120,15
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	100	109,37	109,33	93,77	114,19	114,73
KONSUMSI PEMERINTAH	100	142,10	107,74	119,09	112,23	130,29
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	100	113,63	110,50	108,36	107,89	122,16
PERUBAHAN STOK *	100	54,62	116,10	48,26	117,79	111,97
EKSPORT	100	90,94	103,53	108,51	133,98	108,57
Antar Negara	100	11,73	303,18	239,38	196,48	128,40
Antara Pulau/Propinsi	100	144,91	92,51	84,84	102,09	89,09
IMPORT	100	98,60	100,34	123,37	128,68	129,51
Antar Negara	100	13,22	683,06	112,39	122,28	56,98
Antara Pulau/Propinsi	100	103,47	96,09	123,94	128,98	132,74
PDRB	100	109,48	108,36	108,27	111,52	116,23

TABEL 8.

INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
 PROPINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGGUNAAN
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
 (TAHUN SEBELUMNYA = 100)

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	100	102,47	103,63	106,15	101,77	103,94
Makanan	100	103,02	100,88	109,08	102,13	104,94
Non Makanan	100	101,33	109,34	100,52	101,03	101,82
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	100	103,34	104,59	86,61	103,68	105,72
KONSUMSI PEMERINTAH	100	137,90	101,92	118,00	107,28	106,27
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	100	107,24	106,04	96,28	106,74	113,11
PERUBAHAN STOK *	100	48,34	118,19	49,14	119,69	78,00
EKSPORT	100	64,09	100,02	127,55	141,56	100,85
Antar Negara	100	10,03	346,35	257,19	193,28	114,87
Antara Pulau/Propinsi	100	100,93	83,34	91,08	100,48	79,44
IMPORT	100	59,88	101,85	152,92	155,46	102,81
Antar Negara	100	11,30	780,31	120,75	120,29	30,41
Antara Pulau/Propinsi	100	62,65	94,87	155,64	157,76	106,43
P D R B	100	102,13	103,32	103,20	104,26	104,90

TABEL 9.

INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROPINSI SULAWESI UTARA MENURUT PENGGUNAAN

JENIS PENGGUNAAN	TAHUN					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KONSUMSI RUMAH TANGGA	100	109	113	121	126	149
Makanan	100	107	106	117	123	145
Non Makanan	100	114	125	131	133	156
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NON PROFIT	100	106	111	120	132	143
KONSUMSI PEMERINTAH	100	103	109	110	115	141
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	100	106	110	124	126	136
PERUBAHAN STOK *	100	113	111	109	107	154
EKSPORT	100	142	147	125	118	127
Antar Negara	100	117	102	95	97	108
Antara Pulau/Propinsi	100	144	159	148	151	169
IMPORT	100	165	162	131	108	136
Antar Negara	100	117	102	95	97	182
Antara Pulau/Propinsi	100	165	167	133	109	136
PDRB	100	107,179	112,188	117,741	124,280	125